

ABSTRAK

Penerbitan perintah penangkapan oleh Mahkamah Pidana Internasional (*International Criminal Court/ICC*) terhadap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu merupakan isu penting dalam perkembangan hukum pidana internasional, khususnya terkait penegakan akuntabilitas atas dugaan kejahatan internasional berat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan meliputi Statuta Roma 1998, putusan serta dokumen resmi ICC, dan literatur hukum internasional yang relevan. Pembahasan penelitian ini menitikberatkan pada legalitas perintah penangkapan ICC yang menunjukkan bahwa ICC memiliki dasar yurisdiksi atas dugaan kejahatan yang terjadi di wilayah Palestina sebagai negara pihak Statuta Roma, serta bahwa prinsip imunitas pejabat negara tidak berlaku dalam hukum pidana internasional. Penelitian ini juga mengkaji kendala-kendala dalam pelaksanaan eksekusi perintah penangkapan, antara lain keterbatasan kewenangan ICC yang bergantung pada kerja sama negara, penolakan Israel sebagai negara non-pihak, serta tekanan politik dan diplomatik dari negara-negara sekutu. Melalui pembahasan agama, penelitian ini meninjau eksekusi perintah penangkapan dari perspektif hukum Islam, yang menegaskan prinsip keadilan, pertanggungjawaban pemimpin, dan kewajiban menindak kezaliman tanpa memandang kedudukan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun secara yuridis perintah penangkapan ICC sah, pelaksanaannya menghadapi hambatan struktural dan politik yang signifikan, sementara hukum Islam memberikan legitimasi etis dan moral terhadap upaya penegakan keadilan internasional.

Kata Kunci: *ICC, perintah penangkapan, hukum internasional, hukum Islam.*